

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kondisi Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

a. Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Bono merupakan salah satu dari 17 Desa yang berada di kawasan administrasi Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Desa Bono berlokasi pada kawaan dengan luas 27,85 km² atau 256,788 ha, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Desa Gedangsewu dan Desa Waung

Sebelah Timur : Sawah Moyoketen dan Sawah Tamanan

Sebelah Selatan : Desa Kendalbulur

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Gondang

Desa Bono terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Ngipik, Dusun Bono, dan dusun Cluwok. Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Bono Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Desa Bono selama satu tahun terakhir senantiasa 5155 jumlah penduduk yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1**Data Kependudukan Desa Bono Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2670
Perempuan	2504
Jumlah	5155

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Bono Tahun 2020

Berdasar tabel 4.1 data menyatakan bahwa jumlah laki-laki 2670 orang dan perempuan 2504 orang, hal ini terdapat selisih 166 orang.

Untuk menjalankan program pembangunan desa maka diperlukan sumber daya alam yang mendukung untuk modal utama dalam pembangunan. SDA di Desa Bono dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

**Sumber Daya Alam di Desa Bono Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020**

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Jalan	11,1	Ha
2	Persawahan	113,174	Ha
3	Tegal	60	Ha

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Alam Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat 3 (tiga) sumber daya alam yang ada di Desa Bono yaitu jalan, persawahan, dan tegal.

Dalam melakukan pembangunan desa, Sumber Daya Manusia diperlakukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan desa. Berikut ini Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Bono :

Tabel. 4.3

Data Pendidikan Masyarakat Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Pendidikan	Jumlah
Lulusan SD/Sederajat	251
Lulusan SLTP/Sederajat	104
Lulusan SLTA/Sederajat	232
Lulusan S1/Sederajat	78
Lulusan S2/Sederajat	3
Jumlah	668

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Manusia Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.3 tingkat pendidikan tertinggi di Desa Bono adalah pada jenjang SD/Sederajat dan tingkat pendidikan terendah pada jenjang S2. Hal ini disimpulkan bahwa tingkat ekonomi penduduk Desa Bono masih relatif rendah sehingga tidak banyak yang mampu meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel. 4.4

Data Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh Tani	562
Guru Swasta	3
PNS	29

Pengrajin Industri Rumah Tangga	5
Pengusaha Kecil	13
Petani	701
Sopir	10
Pedagang	156
Karyawan Perusahaan Pemerintah	8
Karyawan Perusahaan Swasta	17
Montir	3
Anggota TNI	3
Anggota POLRI	7
Tukang Batu	18
Jumlah	1533

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Manusia Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.4 data menunjukkan bahwa terdapat 701 penduduk yang memiliki pekerjaan harian sebagai petani. Hal ini berarti penduduk Desa Bono mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu terdapat 3 anggota TNI dan 7 anggota POLRI, hal ini menunjukkan mata pencaharian di Desa Bono sangat bervariasi.

Tabel 4.5

**Data Agama Penduduk Desa Bono Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung**

Agama	Jumlah
Islam	5150
Kristen	5

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Manusia Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.5 penduduk Desa Bono mayoritas beragama islam yang berjumlah 5150 orang, dan lainnya beragama kristen yang berjumlah 5 orang.

b. Deskripsi Pemerintah Desa Bono

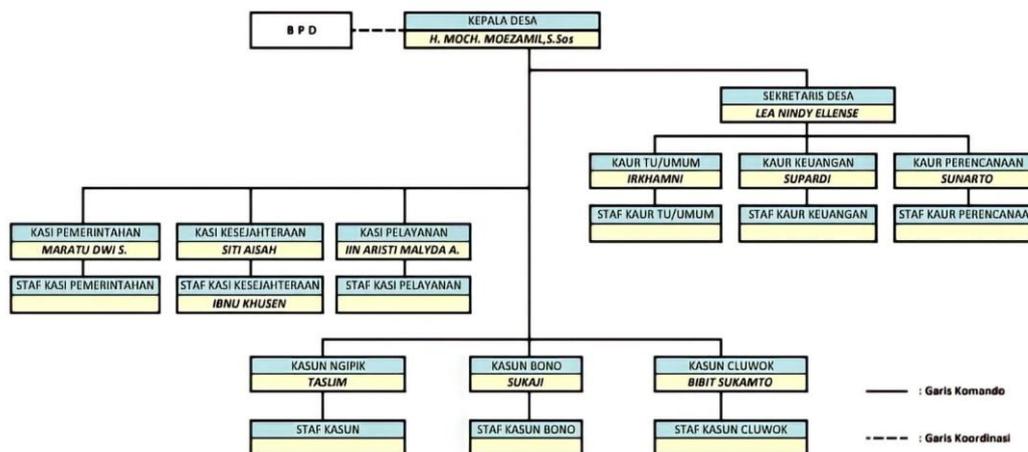
RPJM Desa Bono Tahun 2020 s/d 2025 memiliki visi :
“Perubahan Menuju Desa Yang Lebih Baik” dan mempunyai misi
:

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat.
- 2) Tersedianya infrastruktur (jalan desa, jalan usaha tani, dan lain-lain) yang layak atau memadai.
- 3) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat, juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.
- 4) Pengelolaan keuangan desa yang transparan dengan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Membutuhkan dan melestarikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hari besar nasional, hari besar keagamaan, adat/budaya antara lain : pawai HUT Kemerdekaan RI, peringatan Isro' mi'roj/ maulid nabi, bersih desa (pagelaran wayang kulit) dan lain-lain

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Organisasi Pemerintah Desa dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Desa Bono Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung**



Sumber : SOTK Pemerintah Desa Bono Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono

Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Bono Nomor 04 Tahun 2020 terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dievaluasi sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan

Tabel 4.6

Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	455.300.000,00	455.300.000,00	0,00
2	Dana Desa	1.024.227.000,00	1.013.420.000,00	10.807.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.137.500,00	31.137.500,00	0,00
4	Alokasi Dana Desa	481.371.000,00	476.772.000,00	4.599.000,00
	Total	1.992.035.500	1.976.629.500	15.406.000

Sumber : Peraturan Kepala Desa Bono Nomor 04 Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sumber pendapatan bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa. Total pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 455.300.000,00 terealisasi 455.300.000,00 selisih Rp. 0,00. Total pendapatan dari dana desa direncanakan Rp. 1.024.227.000,00 terealisasi Rp. 1.013.420.000,00 selisih Rp. 10.807.000,00. Total pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi direncanakan 31.137.500,00 terealisasi Rp. 31.137.500,00 selisih Rp. 0,00. Dan total pendapatan dari alokasi dana desa direncanakan Rp. 481.371.000,00 terealisasi Rp. 476.772.000,00 selisih Rp. 15.406.000. Pendapatan yang direalisasikan kurang dari yang direncanakan. Selisih ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan dari dana desa dan alokasi dana desa.

Realisasi Belanja

Tabel 4.7

Realisasi Belanja Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	805.732.112,69	788.783.112,69	16.949.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.027.341.200,00	832.294.450,00	204.046.750,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	116.134.000,00	67.645.000,00	48.489.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	174.085.800,00	176.525.550,00	2.439.750,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	0,00	251.639.000,00	251.639.000,00
	Total	2.123.293.112,69	1.940.362.222,69	475.074.500,00

Sumber : Peraturan Kepala Desa Bono Nomor 04 Tahun 2020

Berdasar tabel diatas bisa diketahui bahwa total realisasi belanja desa tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 2.123.293.112,69 terealisasi Rp. 1.940.362.222,69 selisih Rp. 475.074.500,00. Selisih ini diakibatkan oleh total belanja yang terealisasi kurang dari yang direncanakan yaitu pada biaya penyelenggaraan pemerintah direncanakan Rp. 805.732.112,69 terealisasi Rp. 788.783.112,69 selisih Rp. 16.949.000,00. Biaya pelaksanaan pembangunan desa direncanakan Rp. 1.027.341.200,00 terealisasi Rp. 832.294.450,00 selisih Rp. 204.046.750,00. Biaya pembinaan kemasyarakatan direncanakan Rp. 116.134.000,00 terealisasi Rp. 67.645.000,00 selisih Rp. 48.489.000,00. Biaya pemberdayaan masyarakat direncanakan Rp. 174.085.800,00 terealisasi Rp. 176.525.550,00 selisih Rp. 2.439.750,00. Dan terakhir biaya penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa yang semula tidak direncanakan lalu terealisasi Rp. 251.639.000,00.

3. Gambaran Umum Kondisi Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

a. Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Kendalbulur adalah salah satu dari 17 Desa yang terletak di kawasan administrasi Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Desa Kendalbulur berlokasi pada kawasan dataran rendah dengan luas 2,442,5 km² atau 244,25 ha, dengan batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bono

Sebelah Timur : Desa Boyolangu

Sebelah Selatan : Desa Ngranti

Sebelah Barat : Desa Tawing, Desa Gesikan

Desa Kendalbulur terdiri dari 3 dusun yaitu : Dusun Kendalbulur, Dusun Genting, dan Dusun Rongganan. Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Kendalbulur Tahun 2020, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Desa Kendalbulur selama satu tahun terakhir dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.8

Data Kependudukan Desa Kendalbulur Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1890
Perempuan	1878
Jumlah	3768

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Kendalbulur Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.8 data menunjukkan bahwa jumlah laki-laki 1890 orang dan perempuan 1878 orang, hal ini terdapat selisih 12 orang dengan total jumlah penduduk 3768 orang.

Untuk menjalankan program pembangunan desa maka diperlukan sumber daya alam yang mendukung sebagai modal utama dalam pembangunan. SDA di Desa Kendalbulur dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.9

**Sumber Daya Alam di Desa Kendalbulur Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung Tahun 2020**

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Tegalan	64	Ha
2	Sungai	3	Unit
3	Sawah	121	Ha
4	Pekarangan	56	
5	Perumahan	3,25	Ha

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Alam Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.9 terdapat 5 (lima) sumber daya alam yang ada di Desa Kendalbulur ialah lahan tegalan, sungai, sawah, pekarangan, dan perumahan.

Dalam melakukan pembangunan desa, Sumber Daya Manusia diperlakukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan desa. Berikut ini Sumber Daya Manusia yang terdapat di Desa Kendalbulur :

Tabel. 4.10

**Data Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Kendalbulur
Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung**

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	960
PNS/POLRI/TNI	56
Pensiunan	9
Pedagang	16
Karyawan Pekerja Pabrik	36
Pengusaha Kecil	11
Pengrajin Industri Rumah Tangga	8
Tukang Batu	12
Jumlah	1108

Sumber : Data Aspek Sumber Daya Manusia Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 4.10 data menunjukkan bahwa terdapat 960 penduduk yang memiliki kegiatan harian sebagai petani. Hal ini berarti penduduk Desa Kendalbulur mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu terdapat 8 pengrajin industri rumah tangga dan 11 pengusaha kecil, hal ini menunjukkan mata pencaharian di Desa Kendalbulur sangat bervariasi.

b. Deskripsi Pemerintah Desa Kendalbulur

Dalam pelaksanaan periode pembangunan Tahun 2020 s/d 2025 Desa Kendalbulur mempunyai visi yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang SIAP (Santun, Ikhlas, Amanah, Profesional) dalam upaya menciptakan Desa Kendalbulur yang Sejahtera, Adil, Makmur, dan Guyub Rukun.”

Penjelasan visi :

Visi tersebut mempunyai 4 kata utama, yaitu : **Sejahtera, Adil, Makmur, dan Guyub Rukun.** Untuk mencapai tujuan visi tersebut maka dalam 6 tahun kedepan diwujudkan dengan cara :

- 1) Sejahtera, yang diartikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat.

- 2) Adil, yang diartikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan adil kepada semua lapisan masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya.
- 3) Makmur, yang diartikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan guna menciptakan kemakmuran hidup masyarakat desa.
- 4) Guyub Rukun, yang diartikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa 6 tahun ke depan diharapkan seluruh warga masyarakat untuk ikut berperan dalam mengisi pembangunan ini dan ikut nyengkuyung/mendukung proses pelaksanaan pembangunan desa dan tetap menjaga kerukunan antar warga

Selain visi, pemerintah Desa Kendalbulur mempunyai misi pembangunan untuk 6 tahun mendatang yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab serta peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa untuk mengembangkan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga desa (RT, RW, LPM, LINMAS, PKK, Karang Taruna) guna menunjang Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintah berdasar pada kepentingan masyarakat yang semestinya.
- 3) Pembangunan lapangan Desa Kendalbulur menjadi rencana utama Pembangunan Desa dengan tema Lapangan Wisata guna

setelahnya pengelolaan dan pengembangannya diadakan oleh BUMDes dan membentuk BUMDes sebagai lembaga yang memiliki pengelolaan produktifitas usaha masyarakat yang baik sekaligus sebagai lembaga dalam menaikkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

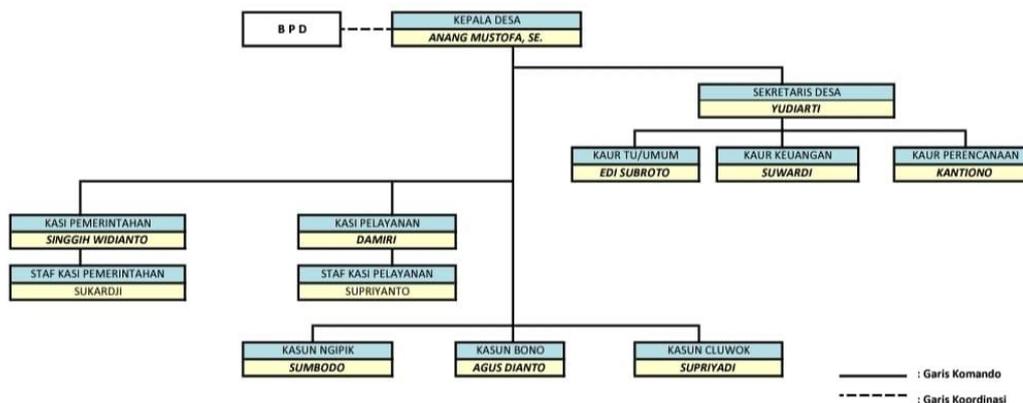
- 4) Menciptakan pola kehidupan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang mempunyai pola hidup sehat dengan cara meningkatkan kualitas program Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Kelas Ibu Hamil, Taman Posyandu, dan POSKESDES.
- 5) Mengorganisir pemuda pemudi Desa Kendalbulur melalui wadah FAD dan Karang Taruna serta meningkatkan kegiatan dan tugasnya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa mendatang.
- 6) Meningkatkan kegiatan poskampling serta menjalin kerjasama bersama seluruh pihak guna menjaga lingkungan desa agar selalu aman dan tertib.
- 7) Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur desa berdasar pada skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- 8) Mengembangkan infrastruktur pertanian antara lain saluran irigasi sawah, talut, plengsengan, sekaligus perbaikan jalan pertanian.

- 9) Mengembangkan kemampuan para petani dan lembaga kelompok tani dengan melakukan pelatihan, pendidikan, sekaligus pengaturan yang tepat dalam bidang pertanian.
- 10) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pendirian kelompok UKM yang produktif selaras dengan keunggulan desa dan kesempatan pasar, serta mengadakan pembimbingan dan pengarahan untuk kelompok UKM dan juga untuk masyarakat.
- 11) Meningkatkan dan melestarikan kegiatan kesenian, kebudayaan, serta keagamaan di Desa Kendalbulur.
- 12) Melakukan peningkatan kepemilikan sertifikat tanah bagi warga melalui ikut serta mensukseskan Program Pemerintah Pusat yaitu PRONA /PTSL.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2

**Struktur Organisasi Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung**



Sumber : SOTK Pemerintah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur

Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Kendalbulur Nomor 01 Tahun 2020 terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dievaluasi sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan

Tabel 4.11

Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	500.800.000,00	500.800.000,00	0,00
2	Dana Desa	829.590.000,00	829.590.000,00	0,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.911.095,00	26.911.095,00	0,00
4	Alokasi Dana Desa	459.723.000,00	459.723.000,00	0,00
	Total	1.817.024.095,00	1.817.024.095,00	0,00

Sumber : Peraturan Kepala Desa Kendalbulur Nomor 01 Tahun 2020

Berdasar tabel diatas dinyatakan bahwa sumber pendapatan bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa. Total pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 500.800.000,00. Pendapatan dari dana desa sebesar Rp. 829.590.000,00. Pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 26.911.095,00. Dan pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp. 459.723.000,00. Dilihat dari tabel 4.11 seluruh pendapatan Desa Kendalbulur yang dianggarkan telah terealisasi seluruhnya. Tidak terdapat selisih antara anggaran dan realisasinya.

Realisasi Belanja

Tabel 4.12

Realisasi Belanja Desa Tahun 2020

No	Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	782.019.000,00	781.259.080,00	759.920,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	937.986.500,00	937.986.500,00	0,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	64.844.000,00	64.844.000,00	0,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	356.059.500,81	356.059.500,00	0,81
	Total	2.221.159.000,81	2.220.399.080	759.920,81

Sumber : Peraturan Kepala Desa Kendalbulur Nomor 01 Tahun 2020

Berdasar tabel diatas dapat dinyatakan bahwa jumlah realisasi belanja desa tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 2.221.159.000,81 terealisasi Rp. 2.220.399.080 selisih Rp. 759.920,81. Selisih ini diakibatkan oleh jumlah belanja yang terealisasi kurang dari yang direncanakan yaitu

pada biaya penyelenggaraan pemerintah direncanakan Rp. 782.019.000,00 terelisasi Rp. 781.259.080,00 selisih Rp. 759.920,00. Biaya pelaksanaan pembangunan desa direncanakan Rp. 937.986.500,00 terealisasi Rp. 937.986.500,00 selisih Rp. 0,00. Biaya pembinaan kemasyarakatan direncanakan Rp. 80.250.000,00 terealisasi Rp. 80.250.000,00 selisih Rp. 0,00. Biaya pemberdayaan masyarakat direncanakan Rp. 64.844.000,00 terealisasi Rp. 64.844.000,00 selisih Rp. 0,00. Dan terakhir biaya penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa direncanakan Rp. 356.059.500,81 terealisasi Rp. 356.059.500,00. Dapat disimpulkan seluruh belanja Desa Kendalbulur hampir terealisasi seluruhnya.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menggali informasi dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sebagai pihak internal dan didukung dengan informan pihak eksternal yaitu Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Bono

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang wajib diberi perhatian dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa,

pemerintah desa memiliki keharusan untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansinya.

Dalam pengelolaan APBDesa tahap pertama yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa yaitu tahap perencanaan. Tahap ini diartikan sebagai tahap awal dimana pemerintah desa dapat menjangkau aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana APBDesa. Bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bono dapat dipaparkan sebagai berikut :

“Perencanaan APBDesa itu perencanaannya dimulai dari tingkat bawah yaitu dari Musrenbangsun (Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun) setelah itu dibawa ke tingkat desa Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Salah satunya itu bentuk transparansi pemerintah desa dalam perencanaannya. Dari usulan masing-masing dusun kita seleksi kita sesuaikan dengan anggaran desa yang ada sehingga ada beberapa yang tidak ditampung karena keterbatasan dana.”⁶⁴

“Perencanaan pembangunan desa disusun dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang mana pembangunan desa tersebut berasal dari usulan masyarakat. Nah setelah semua disetujui untuk besaran dana APBDesa kita publikasikan lewat banner di depan balai desa itu ”⁶⁵

Dalam tahap perencanaan, BPD sebagai perwakilan seluruh masyarakat ikut dalam musyawarah desa bersama dengan pemerintah desa.

“Tahap perencanaan itu membahas usulan masyarakat. Jadi semua yang masyarakat usulkan itu akhirnya kita seleksi berdasarkan skala prioritas kemudian dikaitkan dengan anggaran dan keuangan yang ada. Setelah itu ada tim dari pemerintah desa dari bagian

⁶⁴ Wawancara, Bapak Moezamil selaku Kepala Desa pada 17 November 2021

⁶⁵ Wawancara, Ibu Nindy selaku Sekretaris Desa pada 24 November 2021

perencanaan, kemudian pelaksanaan semua sudah siap untuk menjalankan dari hasil musrenbangdes itu.⁶⁶

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Hasil dari musyawarah tersebut pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dibuatkan skala prioritas yang akan direalisasikan menggunakan dana dari APBDesa. Selain tokoh masyarakat musrenbangdes juga dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga mulai tahap perencanaan APBDesa pemerintah desa melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansinya. Besaran anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan rencana kegiatan diberitahukan kepada masyarakat desa dengan memasang papan informasi anggaran di Kantor Desa Bono.

Setelah tahap perencanaan APBDesa selesai dilakukan dan disetujui oleh pemerintah pusat, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan program. Dalam tahap pelaksanaan program, tranparansi penting untuk dilakukan agar masyarakat desa mengetahui apakah program yang diusulkan dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Berikut paparan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan program kegiatan :

⁶⁶ Wawancara, Bapak Suroso selaku Ketua BPD pada 26 November 2021

“Jadi pelaksanaan programnya kita membentuk TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan) yang terdiri dari Pemerintah Desa, LPM, dan masyarakat. Transparansinya kita membuat banner dan baliho di tiap-tiap dusun. Untuk pelaksanaan kegiatan transparansinya setelah selesai kegiatan kita pasang banner di lokasi kegiatan tersebut. Jadi di banner itu tercantum anggaran dari mana, totalnya berapa, bentuk kegiatannya apa, volumenya berapa”⁶⁷

“Untuk penggunaan anggaran kita selalu publikasikan ke masyarakat. Di setiap lokasi kegiatan pembangunan itu kita pasang semacam papan terkait besaran anggarannya.”⁶⁸

Dalam tahap pelaksanaan program yang didanai oleh APBDDesa, pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dengan cara memasang banner di setiap lokasi kegiatan yang berisi tentang besarnya anggaran dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan program melibatkan tokoh masyarakat seperti BPD dan LPM sebagai (TPK) Tim Pelaksana Kegiatan. Dikatakan juga dari sini masyarakat dapat memantau proses kegiatan pembangunan tersebut sehingga terdapat transparansi pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Untuk lebih menjamin transparansi pemerintah desa pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat desa diperbolehkan mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai pelaporannya.

“Masyarakat itu tahu ketika dia ikut dalam musyawarah desa tadi. Misalnya masyarakat ingin dibuatkan jembatan, lalu buat proposalnya, gambarnya, jika disetujui perencanaannya lalu bisa kita laksanakan. Jadi dari awal kita berangkat dari usulan masyarakat.”⁶⁹

⁶⁷ Wawancara, Bapak Moezamil selaku Kepala Desa pada 17 November 2021

⁶⁸ Wawancara, Ibu Nindy selaku Sekretaris Desa pada 24 November 2021

⁶⁹ Wawancara, Bapak Moezamil selaku Kepala Desa pada 17 November 2021

“Masyarakat bisa mengetahui lewat banner yang sudah kita sediakan. Untuk informasi mengenai pelaporan pengelolaan keuangan secara detail biasanya hanya BPD saja. Kalau terkait usulan dari masyarakat yang sudah disetujui kita sudah buat banner di setiap program pembangunan jadi masyarakat bisa tau.”⁷⁰

Dalam proses pengelolaan keuangan desa masyarakat diperbolehkan mengetahui informasi pada tahap tertentu saja. Misalkan dalam tahap perencanaan masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah desa sehingga masyarakat tau mengenai program yang akan dilaksanakan dari APBDesa. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan masyarakat diberikan akses banner besar dan papan informasi yang menunjukkan besaran anggaran yang digunakan untuk suatu program pembangunan. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa dalam tahap pelaksanaan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana terdapat masyarakat didalamnya, hal ini berarti masyarakat bisa memantau mengenai pelaksanaan program pembangunan tersebut. Lalu selanjutnya dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, informasi hanya dapat diakses oleh BPD atau pihak yang mempunyai wewenang khusus saja. Pemerintah desa menyediakan laporan yang diperbolehkan untuk dipublikasikan yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diakses pada papan informasi di Kantor Desa Bono.

⁷⁰ Wawancara, Ibu Nindy selaku Sekretaris Desa pada 24 November 2021

Untuk membuktikan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, penulis mengajukan pertanyaan terkait kepada masyarakat Desa Bono : apakah pemerintah desa sudah transparan dalam pengelolaan APBDesa?

Dari pertanyaan tersebut, masyarakat Desa Bono memberikan jawaban berikut ini :

“Sudah transparan. Pada saat pelaksanaan itu kan saya diundang dan hadir, disana membahas tentang perencanaan pembangunan tahun kedepan. Dari pihak pemerintah desa juga memberikan brosur mengenai program-program yang akan dilaksanakan, semuanya lengkap dan transparan. Jadi untuk masyarakat sekitar sini yang ingin mengetahui apa saja programnya secara detail bisa ditanyakan langsung ke saya.”⁷¹

“RW diberikan laporan mengenai program apa saja yang akan dianggarkan kedepan, jadi kalo dari pihak masyarakat ingin bertanya bisa langsung tanya saja. Namun kenyataannya masyarakat ini apatis, jarang ada masyarakat yang vokal mau bertanya untuk apa saja. Jadi intinya saya simpulkan masyarakat ini percaya dengan pemerintah desa karna memang pelaksanaan programnya juga mereka lihat sudah baik.”⁷²

“Kalau laporan keuangan programnya apa saja secara detail itu saya nggak tau, tapi kalo untuk anggaran program lingkungan sini saya tau karna kan semua dari usulan kita masyarakat sini.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, pemerintah desa dikatakan sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa sudah mengetahui mengenai seluruh tahapan pengelolaan APBDesa ketika musyawarah desa. Dalam

⁷¹ Wawancara, Bapak Sunyoto selaku tokoh masyarakat Desa Bono pada 13 Desember 2021

⁷² *Ibid*

⁷³ Wawancara, Bapak Jadi selaku tokoh masyarakat Desa Bono pada 12 Desember 2021

musyawarah desa selain membahas mengenai usulan masyarakat mengenai pembangunan di lingkungannya, pemerintah desa juga menjelaskan mengenai program tahun sebelumnya yang terlaksana maupun belum terlaksana sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tau apakah sudah sesuai dengan perencanaannya. Namun tidak seluruh masyarakat desa proaktif dalam hal ini. Masyarakat desa cenderung apatis dan tidak terlalu peduli mengenai APBDesa, masyarakat hanya mengusulkan pembangunan dan mengetahui bahwa apa yang diusulkan sudah dilaksanakan.

b. Akuntabilitas

Dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

Dalam membuat suatu laporan pemerintah desa harus mengikuti aturan atau dasar hukum yang sudah ditetapkan.

“APBDesa disusun berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kita memakai acuan yang sudah ada.”⁷⁴

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷⁴ Wawancara, Bapak Supardi selaku Bendahara Desa pada 24 November 2021

Pemerintah desa wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Jenis laporan yang disajikan oleh pemerintah desa dipaparkan sebagai berikut :

“Jadi kita buat laporan pertanggungjawaban tiap-tiap kegiatan termasuk disitu semua pembiayaan terkait dengan pelaksanaan. Misalnya masalah tukang disitu juga ada laporan hari kerja, absen tukang, dan, pembelian material.”⁷⁵

“Laporan pertanggungjawaban yang dibuat itu ada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa.”⁷⁶

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban laporan atas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada kabupaten/kota setiap akhir tahun melalui camat dalam bentuk Peraturan Desa.

Pertanggungjawaban pemerintah desa penting untuk dilakukan agar terdapat kejelasan penggunaan dana dalam suatu program. Pertanyaan selanjutnya apakah pemerintah desa sudah

⁷⁵ Wawancara, Bapak Supardi selaku Bendahara Desa pada 24 November 2021

⁷⁶ Wawancara, Ibu Nindy selaku Sekretaris Desa pada 24 November 2021

bertanggungjawab dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya.

“Setiap program ada laporan pertanggungjawabannya dan itu kita laporkan ke kabupaten juga menyangkut dengan pencairan dana tahap berikutnya”⁷⁷

“Sudah. Semua laporan tadi sudah kita buat sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya.”⁷⁸

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Bapak

Ichwan selaku Ketua BPD Desa Kendalbulur yaitu :

“Sekarang ini untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sudah ada yang bertanggungjawab dan ada yang kompeten. Masing-masing desa itu ada pendamping dari kecamatan semacam Faskel (Fasilitator Kelurahan). Jadi menurut saya pemerintah Desa Bono ini sudah akuntabel, apalagi di Desa Bono yang saya lihat sudah mengikuti aturan yang ada. Dana desa betul-betul kita taserufkan sesuai dengan aturan yang ada. Kita laksanakan semuanya sesuai dengan aturan yang ada, kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban tahun kemarin itu tidak ada masalah. Dari pihak inspektorat dan kami pihak BPD itu ketika diberi pemberitahuan kami tidak menemukan penyimpangan karna kami ngecek ke lapangan. Jadi titik mana yang dibangun kami lihat memang sesuai dengan anggaran. Dari masyarakatnya sendiri alhamdulillah juga tidak ada masalah, tidak ada demo-demoan terkait hal ini. Karna semuanya itu kita jalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat.”⁷⁹

Dari pernyataan diatas, pemerintah Desa Bono sudah bertanggungjawab dalam melaporkan seluruh laporan pertanggungjawabannya baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pimpinan diatasnya. Dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, pemerintah Desa Bono sudah

⁷⁷ Wawancara, Bapak Moezamil selaku Kepala Desa pada 17 November 2021

⁷⁸ Wawancara, Ibu Nindy selaku Sekretaris Desa pada 24 November 2021

⁷⁹ Wawancara, Bapak Suroso selaku Ketua BPD pada 26 November 2021

mengikuti aturan yang ada. Seluruh dana desa yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan pada saat musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pihak BPD juga menyebutkan tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Bono. Artinya pemerintah Desa Bono sudah akuntabel dalam membuat laporan keuangannya.

Untuk membuktikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, penulis mengajukan pertanyaan terkait kepada masyarakat Desa Bono : apakah pemerintah desa sudah akuntabel dan sudah bertanggungjawab dalam pengelolaan APBDesa?

“Selama ini tidak ada masalah. Kalau misal ada kesalahan dari laporan keuangan dari dulu pasti sudah ada masalah. Dari badan keuangan pun pernah ngecek dan tidak ada masalah. Laporan keuangan desa kan sudah ada yang mengawasi.”⁸⁰

“Untuk laporan pertanggungjawaban itu biasanya yang mengetahui pihak BPD. Kita masyarakat hanya diberitahu sekilas saja melalui musyawarah desa itu tapi untuk detailnya saya kira BPD yang tau.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, pemerintah desa dikatakan sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa. Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa dibuat oleh pemerintah desa sebagai bentuk

⁸⁰ Wawancara, Bapak Sunyoto selaku tokoh masyarakat Desa Bono pada 13 Desember 2021

⁸¹ Wawancara, Bapak Jadi selaku tokoh masyarakat Desa Bono pada 12 Desember 2021

tanggungjawabnya kepada pemerintah di atasnya dan juga pihak BPD. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi akhir tahun bersama-sama dengan BPD dan masyarakat desa.

2. Pemerintah Desa Kendalbulur

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang wajib diberi perhatian dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memiliki keharusan untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansinya.

Dalam pengelolaan APBDesa tahap pertama yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa yaitu tahap perencanaan. Tahap ini diartikan sebagai tahap awal dimana pemerintah desa dapat menjangkau aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana APBDesa.

Bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kendalbulur dapat dipaparkan sebagai berikut :

“Jadi mekanisme perencanaan ini dimulai dari tahapan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui masyarakat dusun. Jadi musyawarah di tingkat dusun setelah itu nanti baru dibawa di musyawarah tingkat desa. Nah melalui musrenbangdes itu nanti dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam satu tahun. Dari RKP itu nanti selanjutnya dieksekusi dan finalisasi dalam RAPBDes tahun yang akan datang. Dalam menyusun RAPBDesa maupun RKP itu juga mengacu dalam RPJM Desa karena setiap desa ini payung hukum perencanaan pembangunan itu di RPJM Desa itu. RKP

dilakukan oleh BPD menyelenggarakan RKP ini setelah itu rekomendasinya apa difinalisasi di APBDesa”⁸²

“Sebelum RAPBDesa itu ada musrenbangdes dulu yang diawali dengan musrenbangsun yang dihadiri oleh BPD satu wilayah, LPM, Ketua RT/RW, Kasun, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam satu dusun juga dihadirkan.”⁸³

“Jadi setelah tau besaran anggarannya itu kita publikasikan lewat baliho besar yang di perempatan itu. Selain itu kita publikasikan lewat Perdes. Lalu ada sosialisasi yang dilaporkan kepada BPD kemudian publikasinya kan melalui RT/RW setiap LPJ”⁸⁴

Dalam tahap perencanaan, BPD sebagai perwakilan seluruh masyarakat ikut dalam musyawarah desa bersamaan dengan pemerintah desa.

“Dalam musdes itu kita bahas anggaran dana desa itu digunakan untuk apa saja, untuk pembangunan apa saja, sosialnya apa saja. Kita bahas semuanya bersama dengan pemerintah desa, dan juga masyarakat desa. Setiap anggaran pendapatan desa dan setiap perencanaan akan diumumkan dengan dibuatkan banner itu di perempatan.”⁸⁵

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Hasil dari musyawarah tersebut pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dibuatkan skala prioritas yang akan direalisasikan menggunakan dana dari APBDesa. Selain tokoh masyarakat musrenbangdes juga dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga mulai tahap perencanaan

⁸² Wawancara, Bapak Anang selaku Kepala Desa pada 30 November 2021

⁸³ Wawancara, Bapak Suwardi selaku Bendahara Desa pada 30 November 2021

⁸⁴ Wawancara, Ibu Yudiarti selaku Sekretaris Desa pada 30 November 2021

⁸⁵ Wawancara, Bapak Ichwan selaku Ketua BPD pada 14 Desember 2021

APBDesa pemerintah desa melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansinya. Besaran anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan rencana kegiatan diberitahukan kepada masyarakat desa melalui papan informasi berupa baliho besar yang ada di perempatan utara Kantor Desa Kendalbulur.

Setelah tahap perencanaan APBDesa selesai dilakukan dan disetujui oleh pemerintah pusat, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan program. Dalam tahap pelaksanaan program, transparansi penting untuk dilakukan agar masyarakat desa mengetahui apakah program yang diusulkan dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Berikut paparan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan program kegiatan :

“Nah jadi bentuk transparansi pelaksanaan program ini kita adakan sosialisasi ke lembaga desa yang ada (RT,RW,BPD,LPM) selanjutnya publikasi ini dimana masyarakat bisa mengakses secara langsung apa saja program tahun depan ini yang masuk dalam rencana APBDesa. Ini kita publikasikan dengan pemasangan banner setiap program kegiatan RAPBDes. Trus selanjutnya selain lewat banner kita publikasikan lewat media sosial punya pemerintah desa yaitu bisa Facebook maupun Instagram. Selain itu juga kita punya program yang namanya Simpeldesa ini kita sosialisasikan disitu.”⁸⁶

“Dalam tahap pelaksanaan program kita sediakan papan informasi besaran anggaran di setiap titik proyek yang dijalankan.”⁸⁷

Bentuk pelaksanaan program pemerintah desa Kendalbulur dikatakan sudah sesuai dengan perencanaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Ichwan selaku Ketua BPD yaitu :

⁸⁶ Wawancara, Bapak Anang selaku Kepala Desa pada 30 November 2021

⁸⁷ Wawancara, Ibu Yudiarti selaku Sekretaris Desa pada 30 November 2021

“Pelaksanaan program desa sudah sesuai menurut undang-undang yang ada. Jadi program pembangunan ya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Bentuk transparansi kepada masyarakat itu lewat media yang ada seperti media sosial dan media semacam tulisan berupa informasi juga ada, lewat RT/RW juga ada”⁸⁸

Dalam tahap pelaksanaan program yang didanai oleh APBDesa, pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dengan cara memasang banner di setiap lokasi kegiatan yang berisi tentang besarnya anggaran dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Selain pemasangan banner di setiap lokasi kegiatan, pemerintah Desa Kendalbulur juga mempublikasikan pelaksanaan kegiatannya melalui media sosial yaitu Facebook dan Instagram. Kepala Desa Kendalbulur juga menyebutkan bentuk transparansi lainnya yaitu masyarakat desa dapat mengakses aplikasi Simpeldesa untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan APBDesa.

“Nah kegiatannya itu kalau proyek pembangunan desa itu namanya TPK. TPK nanti ketuanya Kasun dan anggotanya kelompok masyarakat.”⁸⁹

Pelaksanaan program melibatkan tokoh masyarakat seperti BPD dan LPM sebagai (TPK) Tim Pelaksana Kegiatan. Dikatakan juga dari sini masyarakat dapat memantau proses kegiatan pembangunan tersebut sehingga terdapat transparansi pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Untuk lebih menjamin transparansi pemerintah desa pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat desa

⁸⁸ Wawancara, Bapak Ichwan selaku Ketua BPD pada 14 Desember 2021

⁸⁹ Wawancara, Bapak Anang selaku Kepala Desa pada 30 November 2021

diperbolehkan mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai pelaporannya.

“Iya harus. Jadi masyarakat desa bisa secara mandiri atau melalui wakilnya yaitu BPD yang memang perannya terpilih atas perwakilan masyarakat untuk mengetahui informasi APBDesa. Jadi mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyekpun BPD juga harus melihat apakah antara perencanaan ini dengan pelaksanaan proyeknya sudah sesuai atau belum kegiatannya itu. Jadi tahapan pelaporan, pertanggungjawabannya itu juga masyarakat harus proaktif dan harus dikawal. Pemerintah desa juga secara resmi menyampaikan kepada BPD secara informal kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat.”⁹⁰

Ini dikuatkan dengan jawaban dari pihak BPD berikut ini :

“Sosialisasi bersama masyarakat diadakan setiap akhir tahun. Setiap penggunaan itu disosialisasikan. Pembangunan yang ada itu pasti ada laporan pakai banner itu berisi dana sekian digunakan untuk pembangunan ini sepanjang sekian.”⁹¹

Dalam proses pengelolaan keuangan desa masyarakat diperbolehkan mengetahui informasi APBDesa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah desa sehingga masyarakat tau terkait program yang akan dilakukan dari APBDesa. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan masyarakat diberikan akses banner besar dan papan informasi yang menunjukkan besaran anggaran yang digunakan untuk suatu program pembangunan. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana terdapat masyarakat

⁹⁰ Wawancara, Bapak Anang selaku Kepala Desa pada 30 November 2021

⁹¹ Wawancara, Bapak Ichwan selaku Ketua BPD pada 14 Desember 2021

didalamnya, hal ini berarti masyarakat bisa memantau mengenai pelaksanaan program pembangunan tersebut. Lalu selanjutnya dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban disebutkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif dalam mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan programnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dengan adanya sosialisasi pemerintah desa kepada anggota BPD yang selanjutnya akan disampaikan BPD secara informal kepada masyarakat. Selain melalui BPD masyarakat juga dapat secara mandiri mengetahui informasi pengelolaan APBDesa di kantor desa.

Untuk membuktikan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, penulis mengajukan pertanyaan terkait kepada masyarakat Desa Kendalbulur : apakah pemerintah desa sudah transparan dalam pengelolaan APBDesa?

Dari pertanyaan tersebut, masyarakat Desa Kendalbulur memberikan jawaban berikut ini :

“Menurut saya sudah, Pihak masyarakat itu taunya ketika musyawarah bersama di akhir tahun. Disitu perwakilan masyarakat mengajukan pembangunan apa yang ingin dilaksanakan di lingkungannya. Nah untuk kegiatannya apa saja itu diberitahukan kepada perwakilan masyarakat yaitu BPD dan juga RT/RW. Kalau ada keluhan mengenai pelaksanaannya juga lewat BPD kita sampaikan. Sejauh ini semua berjalan dengan baik. Pembangunan desa kendalbulur ini sudah baik saya lihat-lihat. Perkembangannya juga sangat baik”⁹²

⁹² Wawancara, Bapak Ngari selaku tokoh masyarakat Desa Kendalbulur pada 12 Desember 2021

“Menurut saya pemerintahan Bapak Anang ini saya bisa katakan sangat baik jadi untuk pengelolaannya sudah sesuai dan sudah transparan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, pemerintah desa dikatakan sudah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa sudah mengetahui mengenai seluruh tahapan pengelolaan APBDesa ketika musyawarah desa. Dalam musyawarah desa selain membahas mengenai usulan masyarakat mengenai pembangunan di lingkungannya, pemerintah desa juga menjelaskan mengenai program tahun sebelumnya yang terlaksana maupun belum terlaksana sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tau apakah sudah sesuai dengan perencanaannya. Namun tidak seluruh masyarakat desa proaktif dalam hal ini. Masyarakat desa cenderung apatis dan tidak terlalu peduli mengenai APBDesa, masyarakat hanya mengusulkan pembangunan dan mengetahui bahwa apa yang diusulkan sudah dilaksanakan.

b. Akuntabilitas

Dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

⁹³ Wawancara, Bapak Jombor selaku tokoh masyarakat Desa Kendalbulur pada 13 Desember 2021

Dalam membuat suatu laporan pemerintah desa harus mengikuti aturan atau dasar hukum yang sudah ditetapkan.

“APBDesa disusun berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”⁹⁴

Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah desa wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Jenis laporan yang disajikan oleh pemerintah desa dipaparkan sebagai berikut :

“Laporan yang dibuat itu ada 2 yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang disampaikan kepada pak bupati setiap tahun. Lalu yang kedua namanya LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang ini disampaikan kepada BPD. Jadi ada dua jalur itu tadi, yang pertama disampaikan kepada BPD yang mana dalam hal ini mewakili masyarakat dan yang kedua kita lakukan kepada pemerintah yang lebih tinggi.”⁹⁵

“Laporan pertanggungjawaban yang dibuat itu ada LKPJ, LPPD, LKPPD”⁹⁶

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban laporan atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang meliputi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa. Untuk

⁹⁴ Wawancara, Bapak Suwardi selaku Bendahara Desa pada 30 November 2021

⁹⁵ Wawancara, Ibu Yudiarti selaku Sekretaris Desa pada 30 November 2021

⁹⁶ Wawancara, Bapak Suwardi selaku Bendahara Desa pada 30 November 2021

laporan lainnya yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang diinformasikan kepada bupati atau pemerintah yang lebih tinggi, dan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang dilaporkan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah desa penting untuk dilakukan agar terdapat kejelasan penggunaan dana dalam suatu program. Pertanyaan selanjutnya apakah pemerintah desa sudah bertanggungjawab dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya.

“Kita ada tahapan pelaporan itu. Katakanlah laporan penggunaan secara bertahap laporan ke pemerintah yang diatas. Itu kalo kita tidak sesuai dengan jadwal yang ada ini tidak akan pernah dana selanjutnya bisa cair. Katakanlah hari ini RAPBDes ini harus disahkan bulan Desember, nah kalau RAPBDes ini tidak disahkan tepat waktu ini tidak akan pernah bisa cair dananya. Ataupun laporan penggunaan kalau sudah berjalan satu tahun untuk termin pertama misal sekitar 30% ini dana desa turun, nah dari turun ini kita lakukan kegiatannya. Kalau ini tidak ada laporan hasil kegiatan yang 30% ini nanti juga tidak bisa turun untuk dana tahap yang kedua.”⁹⁷

“Kita selalu melaporkan tepat waktu karena untuk pencairan dananya itu. Tahapan itu kan dilakukan selama satu tahun, katakanlah musdus itu dilakukan di bulan Januari misalnya. Nanti RKP itu dilakukan bulan Agustus, September. RKP nanti trus selanjutnya di APBDes ini bulan Desember. Pokoknya tidak boleh lewat bulan Desember.”⁹⁸

“Saya rasa sudah. Jadi pelaporan ini kita kan ada 2. Jadi pelaporan penggunaan keuangan desa ini secara administrasi kita melaporkan kegiatan pengelolaan dana desa itu kita melalui program OMSPAN

⁹⁷ Wawancara, Bapak Anang selaku Kepala Desa pada 30 November 2021

⁹⁸ Wawancara, Bapak Suwardi selaku Bendahara Desa pada 30 November 2021

itu. Kita laporkan dalam sistem keuangan desa yang kita laporkan ke kementerian keuangan. Selanjutnya kita melakukan pelaporan pada struktur diatas kita dalam hal ini bupati melalui kecamatan. Nah sistem pertanggungjawabannya itu juga kita lakukan kepada masyarakat desa melalui BPD.”⁹⁹

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Ichwan selaku Ketua BPD Desa Kendalbulur yaitu :

“Pemerintah desa sudah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana desa. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa terhadap BPD. BPD disitu mewakili pihak masyarakat. Dan setelah itu ada pemberitaan atau laporan secara tertulis yang dimedia sosial ada dan yang lisan juga ada.”¹⁰⁰

Dari pernyataan diatas, pemerintah Desa Kendalbulur sudah bertanggungjawab dalam melaporkan seluruh laporan pertanggungjawabannya baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pimpinan diatasnya. Dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, pemerintah Desa Kendalbulur sudah mengikuti aturan yang ada. Seluruh dana desa yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan pada saat musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik dan pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkannya. Kepala Desa Kendalbulur juga menyebutkan tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Kendalbulur. Artinya pemerintah Desa Kendalbulur sudah

⁹⁹ Wawancara, Ibu Yudiarti selaku Sekretaris Desa pada 30 November 2021

¹⁰⁰ Wawancara, Bapak Ichwan selaku Ketua BPD pada 14 Desember 2021

akuntabel dalam membuat laporan keuangannya. Namun Sekretaris Desa Kendalbulur menyebutkan terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia pada saat penyusunan laporan pertanggungjawabannya. Kurangnya SDM yang kompeten dalam Kasi/Kaur yang seharusnya ikut bertanggungjawab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disusun hampir seluruhnya oleh Bendahara Desa. Kedepannya Pemerintah Desa Kendalbulur akan melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan kemampuan SDMnya.

Untuk membuktikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDDesa, penulis mengajukan pertanyaan terkait kepada masyarakat Desa Kendalbulur : apakah pemerintah desa sudah akuntabel dan sudah bertanggungjawab dalam pengelolaan APBDDesa?

“Menurut saya sudah bertanggungjawab, semua pelaksanaan saya lihat sudah sesuai dengan perencanaan. Sejauh ini tidak ada masalah. Untuk laporan-laporan itu sebenarnya saya sendiri tidak terlalu tau detailnya tapi untuk besaran anggaran itu kita tau dari banner yang dipasang besar-besar itu. Di setiap lokasi kegiatan juga ada informasinya. Jadi dari pihak masyarakat tidak ada masalah mengenai hal itu.”¹⁰¹

“Sudah. Sejauh yang saya lihat tidak ada masalah mengenai keuangannya. Laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya itu dibahas saat musyawarah, dan saat musyawarah tidak ada yang protes jadi menurut saya pemerintah desa sudah akuntabel.”¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara, Bapak Ngari selaku tokoh masyarakat Desa Kendalbulur pada 12 Desember 2021

¹⁰² Wawancara, Bapak Jombor selaku tokoh masyarakat Desa Kendalbulur pada 13 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, pemerintah desa dikatakan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa. Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa dibuat oleh pemerintah desa sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pemerintah di atasnya dan juga pihak BPD. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi akhir tahun bersama-sama dengan BPD dan masyarakat desa.

3. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi sumber diperlukan untuk mendukung data agar bisa dikatakan valid.

Tabel 4.13

**Triangulasi Sumber Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan APBDesa Bono**

Pertanyaan Penelitian	Informan	Kesimpulan
Transparansi		
Apakah pemerintah Desa Bono sudah transparan dalam pengelolaan APBDesa?	Informan 1 (Pemerintah Desa) Masyarakat itu tahu ketika dia ikut dalam musyawarah desa tadi. Misalnya masyarakat ingin dibuatkan jembatan, lalu buat proposalnya, gambarnya, jika disetujui perencanaannya lalu bisa kita laksanakan. Jadi dari awal kita berangkat dari usulan masyarakat. Untuk anggaran masyarakat bisa mengetahui lewat banner yang sudah kita sediakan. Untuk informasi mengenai pelaporan pengelolaan keuangan secara detail biasanya hanya BPD saja. Kalau terkait usulan dari masyarakat yang sudah disetujui kita sudah buat banner di setiap program pembangunan jadi masyarakat bisa tau.	Prinsip transparansi sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Bono. Pengelolaan APBDesa dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan dengan masyarakat dan BPD. Bentuk publikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan memasang banner terkait besaran anggaran APBDesa dan juga RKP Desa yang diberikan kepada RW sebagai wakil dari
	Informan 2 (BPD) Kita selalu ada	

	<p>musyawarah pertemuan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Jadi masyarakat sudah pasti tau, kita selalu transparan. Selama ini dari pihak masyarakat juga tidak pernah ada masalah.</p>	<p>Pada saat pelaksanaan itu kan saya diundang dan hadir, disana membahas tentang perencanaan pembangunan tahun kedepan. Dari pihak pemerintah desa juga memberikan brosur mengenai program-program yang akan dilaksanakan, semuanya lengkap dan transparan. Jadi untuk masyarakat sekitar sini yang ingin mengetahui apa saja programnya secara detail bisa ditanyakan langsung ke saya.</p>	<p>masyarakat disekitarnya. Tidak ada masalah yang berarti terkait dengan transparansi pengelolaan APBDesa Bono.</p>
Akuntabilitas			
<p>Apakah pemerintah Desa Bono sudah bertanggungjawab dan akuntabel dalam pengelolaan APBDesa?</p>	<p>Informan 1 (Pemerintah Desa) Setiap program ada laporan pertanggungjawabannya dan itu kita laporkan ke kabupaten juga menyangkut dengan pencairan dana tahap berikutnya. Semua laporan tadi sudah kita buat sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya</p>	<p>Informan 2 (Tokoh Masyarakat) Selama ini tidak ada masalah. Kalau misal ada kesalahan dari laporan keuangan dari dulu pasti sudah ada masalah. Dari badan keuangan pun pernah ngecek dan tidak ada masalah. Laporan keuangan desa kan sudah ada yang mengawasi.</p>	<p>Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bono pada pemerintahan diatasnya sudah dilakukan dengan baik. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Bono sudah dilaporkan secara tepat waktu kepada Kabupaten/Kota dan tidak terdapat masalah yang berarti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bono sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Bentuk</p>
	<p>Informan 3 (BPD) Sekarang ini untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sudah ada yang bertanggungjawab dan ada yang kompeten. Masing-masing desa itu ada pendamping dari kecamatan semacam Faskel (Fasilitator Kelurahan). Jadi menurut saya pemerintah Desa Bono ini sudah akuntabel, apalagi di Desa Bono yang saya lihat sudah mengikuti aturan yang ada. Dana desa betul-betul kita tasarufkan sesuai</p>		

	<p>dengan aturan yang ada. Kita laksanakan semuanya sesuai dengan aturan yang ada, kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban tahun kemarin itu tidak ada masalah. Dari pihak inspektorat dan kami pihak BPD itu ketika diberi pemberitahuan kami tidak menemukan penyimpangan karna kami ngecek ke lapangan. Jadi titik mana yang dibangun kami lihat memang sesuai dengan anggaran. Dari masyarakatnya sendiri alhamdulillah juga tidak ada masalah, tidak ada demo-demoan terkait hal ini. Karna semuanya itu kita jalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat.</p>	<p>pertanggungjawaban pemerintah Desa Bono dengan masyarakatnya adalah dengan sosialisasi pertanggungjawaban kegiatan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana yang diadakan akhir tahun bersamaan dengan perencanaan APBDesa tahun berikutnya.</p>
--	---	--

Tabel 4.14

**Triangulasi Sumber Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan APBDesa Kendalbulur**

Pertanyaan Penelitian	Informan		Kesimpulan
Transparansi			
<p>Apakah pemerintah Desa Kendalbulur sudah transparan dalam pengelolaan APBDesa?</p>	<p>Informan 1 (Pemerintah Desa) Iya harus transparan. Jadi masyarakat desa bisa secara mandiri atau melalui wakilnya yaitu BPD yang memang perannya terpilih atas perwakilan masyarakat untuk mengetahui informasi APBDesa. Jadi mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyekpun BPD juga harus melihat apakah antara perencanaan ini dengan pelaksanaan proyeknya sudah sesuai atau belum kegiatannya itu. Jadi tahapan pelaporan, pertanggungjawabannya itu juga masyarakat harus proaktif dan harus dikawal. Pemerintah desa juga secara resmi menyampaikan kepada BPD secara informal kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat.</p>	<p>Informan 3 (Tokoh Masyarakat) Menurut saya sudah, Pihak masyarakat itu taunya ketika musyawarah bersama di akhir tahun. Disitu perwakilan masyarakat mengajukan pembangunan apa yang</p>	<p>Prinsip transparansi sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Bono. Pengelolaan APBDesa dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan dengan masyarakat dan BPD. Bentuk publikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan memasang banner terkait besaran anggaran APBDesa dan juga RKP Desa yang diberikan kepada RW sebagai wakil dari masyarakat disekitarnya. Tidak ada masalah yang berarti terkait dengan transparansi pengelolaan APBDesa.</p>
	<p>Informan 2 (BPD) Sosialisasi bersama masyarakat diadakan setiap akhir tahun. Setiap penggunaan itu disosialisasikan. Pembangunan yang ada itu pasti ada laporan pakai banner itu berisi dana sekian digunakan</p>		

	untuk pembangunan ini sepanjang sekian.	ingin dilaksanakan di lingkungannya. Nah untuk kegiatannya apa saja itu diberitahukan kepada perwakilan masyarakat yaitu BPD dan juga RT/RW. Kalau ada keluhan mengenai pelaksanaannya juga lewat BPD kita sampaikan. Sejauh ini semua berjalan dengan baik. Pembangunan desa kendalbulur ini sudah baik saya lihat-lihat. Perkembangannya juga sangat baik.	
Akuntabilitas			
Apakah pemerintah Desa Kendalbulur sudah bertanggungjawab dan akuntabel dalam pengelolaan APBDesa?	Informan 1 (Pemerintah Desa) Kita ada tahapan pelaporan itu. Katakanlah laporan penggunaan secara bertahap laporan ke pemerintah yang diatas. Itu kalo kita tidak sesuai dengan jadwal yang ada ini tidak akan pernah dana selanjutnya bisa cair. Katakanlah hari ini RAPBDes ini harus disahkan bulan Desember, nah kalau RAPBDes ini tidak disahkan tepat waktu ini tidak akan pernah bisa cair dananya. Ataukah laporan penggunaan kalau sudah berjalan satu tahun untuk termin pertama misal sekitar 30% ini dana desa turun, nah dari turun ini kita lakukan kegiatannya. Kalau ini tidak ada laporan hasil kegiatan yang 30% ini nanti juga tidak bisa turun untuk dana tahap yang kedua. Pelaporan ini kita kan ada 2. Jadi pelaporan penggunaan keuangan desa ini secara administrasi kita melaporkan kegiatan pengelolaan dana desa itu kita melalui program OMSPAN itu. Kita laporkan dalam sistem keuangan desa yang kita laporkan ke kementerian keuangan. Selanjutnya kita melakukan pelaporan pada struktur diatas kita dalam hal ini bupati melalui kecamatan. Nah sistem pertanggungjawabannya itu juga kita lakukan kepada masyarakat desa melalui BPD.		Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalbulur pada pemerintahan diatasnya sudah dilakukan dengan baik. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Kendalbulur sudah dilaporkan secara tepat waktu kepada Kabupaten/Kota dan tidak terdapat masalah yang berarti. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan prinsip
	Informan 2 (BPD) Pemerintah desa sudah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana desa. Laporan pertanggungjawaban itu	Informan 3 (Tokoh Masyarakat) Menurut saya sudah bertanggungjawab, semua pelaksanaan saya lihat sudah sesuai dengan perencanaan.	

	<p>merupakan tanggungjawab pemerintah desa terhadap BPD. BPD disitu mewakili pihak masyarakat. Dan setelah itu ada pemberitaan atau laporan secara tertulis yang dimedia sosial ada dan yang lisan juga ada.</p>	<p>Sejauh ini tidak ada masalah. Untuk laporan-laporan itu sebenarnya saya sendiri tidak terlalu tau detailnya tapi untuk besaran anggaran itu kita tau dari banner yang dipasang besar-besar itu. Di setiap lokasi kegiatan juga ada informasinya. Jadi dari pihak masyarakat tidak ada masalah mengenai hal itu. Laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya itu kan dibahas saat musyawarah, dan saat musyawarah tidak ada yang protes jadi menurut saya pemerintah desa sudah akuntabel.</p>	<p>akuntabilitas.</p>
--	--	---	-----------------------